

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

Pesta Maria Silalahi

Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia

Email Korespondensi: hartamariana2512@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes local government strategies in implementing Gender Mainstreaming (PUG) and examines community participation in supporting its implementation in the Administrative Regency of Kepulauan Seribu. The region has the lowest Gender Development Index (GDI) in DKI Jakarta, making gender equality a significant development issue. This research employs a qualitative case study approach using in-depth interviews with nine informants from government institutions, program implementers, and community members. Data were analyzed using Gender Mainstreaming theory by Caroline Moser (1993), Gender and Development (GAD), and Arnstein Ladder of Citizen Participation (1969). The findings indicate that the local government has implemented five main strategies: strengthening gender institutions, involving women in development planning forums, enhancing the capacity of government officials, implementing women's empowerment programs, and conducting gender equality campaigns. However, these strategies have not been fully effective. Women's participation in development decision-making remains at the tokenism level, where participation is largely formal and has limited influence on policy outcomes. The implementation of PUG is constrained by persistent patriarchal values, weak institutional coordination, limited gender-responsive budgeting, and insufficient capacity among government officials. The study recommends strengthening *cross-sectoral* coordination, increasing gender-responsive budget allocations, and promoting substantive participation of women in all stages of development.

Keywords: Gender Mainstreaming, Local Government Strategy, Community Participation.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta mengkaji partisipasi masyarakat dalam mendukung implementasinya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Wilayah ini memiliki Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah di DKI Jakarta sehingga isu kesetaraan gender menjadi penting dalam pembangunan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang berasal dari unsur pemerintah, pelaksana program, dan masyarakat. Analisis data menggunakan teori Gender Mainstreaming Caroline Moser (1993), Gender and Development (GAD), serta Ladder of Citizen Participation Arnstein (1969). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan lima strategi utama, yaitu penguatan kelembagaan gender, pelibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan, peningkatan kapasitas aparatur, program pemberdayaan perempuan, serta sosialisasi kesetaraan gender. Namun, implementasinya belum optimal. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan masih berada pada tingkat tokenisme, yaitu keterlibatan yang bersifat formal tetapi belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan. Hambatan utama meliputi kuatnya budaya patriarki, lemahnya koordinasi kelembagaan, keterbatasan anggaran responsif gender, dan rendahnya kapasitas sebagian aparatur pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan anggaran responsif gender, serta perluasan partisipasi substantif perempuan dalam seluruh tahapan pembangunan.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Strategi Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender tersebut diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh Kementerian, lembaga pemerintah, serta pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. (Indonesia, 2000). Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan juga dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. (Indonesia, 1945).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembangunan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam sektor pengambilan keputusan yang kurang melibatkan perempuan. Representasi perempuan dalam jabatan strategis pemerintah dan lembaga legislatif belum mencapai 30% sebagaimana didorong dalam kebijakan afirmatif politik. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sekitar 54 %, sedangkan laki-laki mencapai sekitar 84%. (BPS, 2023) Sebagai pusat pemerintahan dan daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Indonesia, Jakarta memiliki perangkat kelembagaan yang relatif lengkap, termasuk dinas khusus pemberdayaan perempuan, data terpilah gender, serta mekanisme penganggaran yang lebih maju. Secara teoritis, dengan sumber daya dan kapasitas kelembagaan tersebut, implementasi PUG seharusnya berjalan optimal. Namun kenyataannya, dominasi laki-laki dalam jabatan struktural dan posisi. Data menunjukkan bahwa pada periode 2019-2024 jumlah anggota perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta hanya 23 orang dari total 106 anggota atau sekitar 21,7%, sedangkan laki-laki mencapai sekitar 78,3%. Angka ini masih berada di bawah target afirmatif keterwakilan perempuan sebesar 30% yang diharapkan dalam lembaga legislatif.

Ketimpangan tersebut juga tercermin di sektor non-pemerintah, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan berada di kisaran 54,5%, sementara laki-laki mencapai sekitar 83,9%. Artinya, terdapat selisih hampir 30% yang menunjukkan bahwa perempuan masih jauh lebih sedikit terlibat dalam aktivitas ekonomi dibandingkan laki-laki sekitar 55%. Sektor informal ini umumnya memiliki karakteristik pendapatan yang tidak stabil, minim perlindungan sosial, serta terbatas dalam akses terhadap pengambilan keputusan. Jika dilihat dari indikator pembangunan gender, kondisi DKI Jakarta sebenarnya menunjukkan capaian yang relatif baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Tetapi meskipun nilai indeks ini relatif tinggi di DKI Jakarta, ketimpangan partisipasi dalam struktur pengambilan keputusan masih tetap ditemukan.

Sampai pada wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang merupakan satu satunya wilayah kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki wilayah kepulauan. Kondisi geografis yang terpisah dari daratan utama Jakarta serta jumlah penduduk yang relatif kecil menyebabkan dinamika pembangunan dan partisipasi masyarakat di wilayah ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan wilayah kota lainnya di DKI Jakarta, dan dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berada pada peringkat terakhir.

Tabel 1: IPG Daerah Khusus Jakarta Berdasarkan Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota Administratif	IPG
1	Kabupaten Jakarta Selatan	98,43
2	Kabupaten Jakarta Pusat	97,60
3	Kabupaten Jakarta Barat	96,58
4	Kabupaten Jakarta Timur	96,54
5	Kabupaten Jakarta Utara	95,04
6	Kepulauan Seribu	94,48

Sumber : BPS DKI Jakarta, 2026

Nilai IPG pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan di Kabupaten Administratif Pulau Seribu masih tergolong lebih rendah jika dibandingkan laki-laki. Dengan demikian, dibandingkan wilayah lain di DKI Jakarta, Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan tingkat kesenjangan gender yang relatif lebih besar.

Jumlah penduduk di Kepulauan Seribu mencapai sekitar 30.414 jiwa pada 2024, dengan mayoritas penduduk berada dalam kelompok usia produktif (15-59 tahun). Sekitar 27 % penduduk masih tergolong anak-anak (0-14 tahun), sedangkan penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) sekitar 68% dari total populasi. Distribusi jenis kelamin di Kepulauan Seribu juga menunjukkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Data BPS tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 14.596 jiwa dan perempuan sekitar 14.329 jiwa, yang berarti proporsi perempuan hampir menyamai laki-laki.

Kondisi ini menjadi penting dalam konteks pengarusutamaan gender, mengingat semakin seimbang komposisi gender penduduk seharusnya diikuti dengan kesempatan yang setara dalam peran sosial dan pembangunan. Namun demikian, data pendidikan di Kepulauan Seribu menunjukkan adanya kekurangan dalam proporsi pendidikan tinggi (S1 ke atas) pada akhir 2024. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut, yang tentunya berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai proses pembangunan, terutama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan forum perencanaan pembangunan.

Sebagai wilayah kepulauan dengan masyarakat pesisir, struktur sosial di Kepulauan Seribu masih dipengaruhi nilai-nilai patriarki, di mana laki-laki lebih dominan dalam ruang publik dan pengambilan keputusan, termasuk kepemimpinan organisasi masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, serta forum perencanaan pembangunan. Sementara itu, perempuan lebih banyak berperan dalam aktivitas domestik dan ekonomi rumah tangga, sehingga akses mereka terhadap ruang pengambilan keputusan strategis menjadi terbatas. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang nyata dalam partisipasi pembangunan, meskipun secara normatif pemerintah telah mengatur kebijakan pengarusutamaan gender. (BPS, tahun 2026)

Pemerintah Kabupaten Administratif Pulau Seribu melalui berbagai strategi yang meliputi penguatan kelembagaan gender, pelibatan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penguatan kelembagaan gender, dengan membentuk Pokja PUG sebagai koordinator integrasi perspektif gender di seluruh perangkat daerah dan menempatkan *focal point* gender di setiap dinas dan lembaga. Strategi ini bertujuan agar setiap program pembangunan daerah, dari perencanaan hingga evaluasi, memperhatikan kesetaraan gender. Meskipun demikian, realita di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar level, khususnya dari kelurahan dan RT/RW hingga kecamatan, masih lemah sehingga PUG belum sepenuhnya tersentuh di masyarakat pulau kecil.

Pemerintah daerah berupaya melibatkan perempuan dalam forum perencanaan pembangunan, seperti musrenbang kelurahan dan kecamatan, untuk memberikan ruang bagi perempuan

menyampaikan aspirasi terkait pembangunan daerah, Tujuan dari strategi ini adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan memastikan kebutuhan serta kepentingan perempuan tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan. Faktanya, perempuan sering hadir sebagai peserta atau perwakilan kelompok masyarakat seperti PKK atau kader kesehatan, dan usulan yang mereka sampaikan cenderung tidak menjadi prioritas, sehingga partisipasi substantif perempuan masih rendah.

Penguatan kapasitas aparaturnya pemerintah, termasuk pelatihan analisis gender, penyusunan anggaran responsif gender, dan bimbingan teknis terkait perencanaan berbasis gender. Strategi ini dimaksudkan agar aparaturnya pemerintah mampu merancang program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan. Namun, pelatihan dan bimbingan ini umumnya diberikan di tingkat dinas atau kecamatan, sementara aparaturnya di tingkat RT/RW atau pengelola komunitas lokal jarang tersentuh, sehingga implementasi di tingkat paling bawah masih minim.

Pemerintah juga mengembangkan program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, homestay, pelatihan pariwisata, dan kampanye literasi gender melalui komunitas maupun sekolah. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi perempuan sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender. Namun, program-program ini cenderung fokus pada aspek ekonomi dan sosialisasi tanpa mampu mengubah struktur sosial yang membatasi peran perempuan dalam pengambilan keputusan publik.

Dari perspektif *Gender and Development* (GAD) ketimpangan gender yang masih terjadi menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan yang bersifat struktural. Pendekatan GAD menekankan bahwa ketidaksetaraan gender tidak hanya disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga oleh konstruksi sosial dan budaya yang membentuk relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Oleh karena itu, upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak cukup hanya melalui peningkatan partisipasi perempuan secara kuantitatif, melainkan harus mampu mengubah struktur sosial yang membatasi akses, kontrol, dan manfaat perempuan dalam Pembangunan. (Moser, 1993)

Teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein, tingkat partisipasi perempuan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masih berada pada tahap tokenism. Pada tingkat ini, masyarakat termasuk perempuan yang telah diberikan ruang untuk berpartisipasi, seperti melalui mekanisme konsultasi dari forum musyawarah, namun keterlibatan tersebut belum disertai dengan kekuasaan yang memadai untuk menentukan keputusan. Dengan kata lain, partisipasi yang terjadi masih bersifat simbolik dan belum mencerminkan distribusi kekuasaan yang setara antara pemerintah dan masyarakat (Arnstein, 1969). Kondisi tersebut dapat terlihat dalam pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta berbagai program pemberdayaan perempuan di Kepulauan Seribu. Meskipun perempuan secara formal dilibatkan dalam proses tersebut, dalam praktiknya mereka masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya kapasitas dalam menyampaikan aspirasi, dominasi laki-laki dalam proses diskusi, serta terbatasnya akses terhadap informasi dan sumber daya. Hal ini mengakibatkan aspirasi perempuan seringkali tidak menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Dengan demikian, permasalahan utama penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan Pengarusutamaan Gender dengan realita partisipasi perempuan dalam pembangunan di Kepulauan Seribu. Meskipun berbagai strategi telah dilakukan, namun partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, bahkan cenderung stagnan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan Pengarusutamaan gender serta faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi alamiah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan melibatkan sembilan informan yang dipilih secara *purposive*, terdiri atas unsur pemerintah daerah, pelaksana program, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan PUG dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang khas.

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, melalui Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP), telah menjalankan berbagai upaya dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Menurut Moser (1993), Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang bertujuan memastikan laki-laki dan perempuan memperoleh akses, kontrol, dan manfaat yang setara dari hasil pembangunan, sehingga keberhasilannya tidak dapat diukur hanya dari aspek regulasi, tetapi juga dari sejauh mana perspektif gender benar-benar terintegrasi ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Sejalan dengan pandangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021), keberhasilan PUG ditentukan oleh lima prasyarat utama, yaitu dukungan kelembagaan, pelibatan masyarakat, peningkatan kapasitas, pelaksanaan program yang responsif gender, serta sosialisasi yang berkelanjutan. Kelima indikator tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk membedah strategi pemerintah daerah secara lebih sistematis.

Penguatan kelembagaan Gender

Pada dimensi kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah membentuk perangkat kelembagaan yang secara formal mendukung pelaksanaan PUG. Dasar hukum pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender, yang kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PUG di tingkat kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Tahun 2024 Nomor 26. Dalam struktur tersebut, Sudin PPAPP ditempatkan sebagai sekretariat Pokja PUG dengan tugas yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, bimbingan teknis, hingga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG di setiap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Sudin PPAPP, dapat dijelaskan bahwa koordinasi pelaksanaan PUG dilakukan melalui Pokja PUG yang anggotanya berasal dari berbagai UKPD di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan penegasan bahwa pelaksanaan PUG pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab Sudin PPAPP, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah berupaya membangun mekanisme kerja yang bersifat lintas sektor sebagaimana diamanatkan oleh prinsip dasar Pengarusutamaan Gender. Akan tetapi, hasil pendalaman lebih lanjut justru memperlihatkan kecenderungan yang berbeda dari yang dinyatakan secara normatif tersebut. Hampir seluruh fungsi inti pelaksanaan PUG, mulai dari pembinaan, pendampingan, hingga evaluasi, pada praktiknya masih terkonsentrasi pada Sudin PPAPP sebagai *leading sector*.

Keterangan dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memperkuat temuan tersebut. Bappeda menjelaskan bahwa meskipun isu Pengarusutamaan Gender telah menjadi

bagian yang harus diperhatikan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, posisi Bappeda lebih banyak berfungsi sebagai koordinator dalam proses perencanaan, sementara *leading sector* pelaksanaan teknis PUG tetap berada pada Sudin PPAPP. Pada tingkat yang lebih rendah, pihak kelurahan menjelaskan bahwa peran mereka dalam pelaksanaan PUG lebih banyak berfungsi sebagai pelaksana kebijakan yang telah diarahkan oleh pemerintah kabupaten maupun kecamatan, dibandingkan sebagai aktor yang turut merumuskan kebijakan. Pola ini mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan PUG masih bersifat top-down, yaitu kebijakan disusun di tingkat atas dan kemudian dilaksanakan oleh aparatur pada tingkat bawah, sementara inisiatif kelembagaan secara mandiri di tingkat kelurahan masih relatif terbatas.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun struktur kelembagaan PUG telah terbentuk secara formal melalui Pokja PUG dan regulasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, distribusi tanggung jawab antar perangkat daerah belum sepenuhnya seimbang. Hal ini sejalan dengan pandangan Moser (1993) yang menegaskan bahwa keberhasilan Pengarusutamaan Gender tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan dan struktur organisasi, melainkan juga oleh kemampuan seluruh institusi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tugas dan fungsi masing-masing. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Sari dan Suryani (2022) yang menunjukkan bahwa keberadaan Pokja PUG dan regulasi daerah belum secara otomatis menjamin terlaksananya PUG secara optimal apabila tanggung jawab implementasi masih terpusat pada satu perangkat daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik secara struktural, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, sehingga penguatan koordinasi dan komitmen lintas sektor masih menjadi kebutuhan mendesak.

Pelibatan

Indikator pelibatan menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, baik dari segi kuantitas kehadiran maupun kualitas keterlibatannya. Pemerintah daerah telah menyediakan berbagai ruang partisipasi bagi masyarakat dalam mendukung PUG, antara lain melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari rembuk RW hingga tingkat kabupaten, serta melalui keterlibatan organisasi masyarakat seperti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dasawisma, Forum Anak, dan majelis taklim. Kepala Seksi Sudin PPAPP menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam pembangunan bersifat wajib mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi, dan bahwa forum anak maupun berbagai organisasi perempuan turut dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan sebagai wadah partisipasi perempuan di masyarakat.

Meskipun demikian, apabila ditelaah lebih jauh, kelompok masyarakat yang paling sering terlibat dalam berbagai forum tersebut masih didominasi oleh organisasi-organisasi yang sebelumnya telah aktif dan memiliki struktur yang jelas, seperti PKK, Dasawisma, dan majelis taklim. Strategi ini memang memudahkan pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara efisien, tetapi di sisi lain berpotensi menyebabkan partisipasi hanya berpusat pada kelompok tertentu yang sudah memiliki pendekatan dengan program pemerintah. Keterangan dari pihak Bappeda menjelaskan bahwa proses penjangkauan usulan pembangunan dimulai dari rembuk RW, kemudian diteruskan ke Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten, dengan organisasi perempuan turut diundang untuk menyampaikan aspirasinya pada setiap jenjang tersebut. Informasi dari kader Dasawisma menunjukkan bahwa perempuan memang kerap diundang dalam rapat atau musyawarah dan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun usulan yang kemudian dicatat dan dibahas dalam rapat, tetapi ke tidakhadiran perempuan dalam sejumlah kesempatan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan waktu akibat tanggung jawab mengurus anak dan pekerjaan rumah tangga, bukan karena ketidakinginan untuk berpartisipasi.

Temuan ini relevan dengan hasil penelitian Agnes dkk (2023) mengenai partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang menunjukkan bahwa perempuan memang telah diberikan ruang

untuk berpartisipasi, tetapi partisipasi yang terjadi masih banyak berasal dari kelompok perempuan yang aktif dalam organisasi masyarakat, sehingga tidak semua perempuan memiliki tingkat keterlibatan yang sama. Penelitian Maryanah dkk (2022) juga menegaskan bahwa keberhasilan pelibatan masyarakat semestinya tidak diukur hanya dari jumlah peserta yang hadir, melainkan dari keberagaman kelompok masyarakat yang benar-benar terlibat dalam pembangunan. Dengan merujuk pada kedua temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama pada indikator pelibatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bukan terletak pada ketersediaan forum partisipasi, yang pada dasarnya telah cukup terbuka, melainkan pada belum meratanya jangkauan kelompok masyarakat, khususnya perempuan di luar organisasi formal, yang benar-benar dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan.

Kapasitas

Kapasitas berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat, dalam memahami dan mengimplementasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Sudin PPAPP, peningkatan kapasitas aparatur dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan dan pelatihan setiap tahun, sehingga pemahaman mengenai PUG di kalangan aparatur secara umum sudah cukup baik. Namun, tantangan yang dihadapi adalah adanya pergantian pegawai pada beberapa perangkat daerah, yang mengharuskan sosialisasi dan bimbingan dilakukan kembali kepada pegawai baru agar pemahaman mengenai PUG tetap terjaga. Materi bimbingan teknis yang diberikan juga tidak hanya menyangkut konsep dasar PUG, tetapi juga aspek teknis seperti mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program kerja, penyusunan data terpilah, serta penyusunan laporan yang responsif gender.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan pihak Bappeda yang menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala bersama Sudin PPAPP sebagai *leading sector* PUG, sehingga proses pembelajaran organisasi tidak hanya bertumpu pada pelatihan formal semata. Pada tingkat kelurahan, kapasitas aparatur juga didukung oleh latar belakang pendidikan yang relatif memadai serta keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang mengacu pada ketentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak hanya bergantung pada pemahaman individu pegawai, tetapi juga didukung oleh sistem kerja organisasi yang lebih konsisten.

Sebaliknya, peningkatan kapasitas yang relatif baik pada tingkat birokrasi tersebut belum diikuti secara setara oleh peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami isu kesetaraan gender. Keterangan dari masyarakat Pulau Tidung menunjukkan bahwa salah satu kendala utama adalah tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat yang masih beragam, di mana sebagian masyarakat belum memahami bahwa kesetaraan gender bukan berarti menyamakan laki-laki dan perempuan dalam segala hal, melainkan memberikan kesempatan yang sama dalam pembangunan. Temuan serupa juga disampaikan oleh masyarakat Kepulauan Seribu Utara, yang menyebutkan masih adanya anggapan bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin atau pengambil keputusan, sedangkan perempuan dianggap lebih banyak berperan dalam urusan rumah tangga. Kesenjangan antara kapasitas aparatur dan kapasitas masyarakat ini menunjukkan bahwa keberhasilan penguatan kapasitas pada tingkat birokrasi belum secara otomatis diikuti oleh perubahan cara pandang masyarakat terhadap isu gender, sehingga penguatan kapasitas ke depan perlu menasar secara lebih intensif kelompok masyarakat di luar lingkup pemerintahan.

Program

Indikator program melihat sejauh mana kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah telah responsif gender, yakni memberikan akses, manfaat, partisipasi, dan kesempatan yang setara bagi laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan keterangan Kepala Seksi Sudin PPAPP, pelaksanaan PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu didukung oleh berbagai program, mulai dari penguatan kelembagaan melalui Pokja PUG, *Gender Champion*, dan *Focal Point*, kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, hingga program

pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan PKK dan berbagai program pemberdayaan keluarga. Pihak Bappeda menambahkan bahwa meskipun program-program yang secara khusus berkaitan dengan PUG sebagian besar berada di bawah koordinasi Sudin PPAPP, perangkat daerah lain pada dasarnya juga memiliki kegiatan yang mendukung kesetaraan gender sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Dari sudut pandang masyarakat, keberadaan program pemerintah cukup dirasakan manfaatnya, terutama program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Tokoh perempuan di Pulau Tidung menjelaskan bahwa pemerintah cukup sering mengadakan program pemberdayaan perempuan, pelatihan keterampilan, sosialisasi mengenai peran perempuan dalam pembangunan, sosialisasi kesehatan ibu dan anak, hingga kegiatan pemberdayaan ekonomi yang melibatkan ibu-ibu PKK. Akan tetapi, sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa efektivitas program tersebut masih perlu dipertanyakan, khususnya terkait pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti pada kelompok nelayan, yang dirasa masih belum maksimal tersentuh oleh program yang ada. Pandangan senada juga disampaikan oleh masyarakat Kepulauan Seribu Utara, yang menilai bahwa program-program yang dijalankan memang cukup membantu menambah penghasilan keluarga, namun masih lebih banyak berfokus pada kegiatan ekonomi dan keterampilan, sementara program yang secara langsung mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan dirasa masih belum terlalu terlihat.

Perbedaan perspektif tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat mengenai capaian implementasi PUG. Dari sudut pandang pemerintah, banyaknya program yang telah dilaksanakan dipandang sebagai bukti keberhasilan pelibatan perempuan dalam pembangunan. Namun dari sudut pandang sebagian masyarakat, keterlibatan perempuan dalam program tersebut masih lebih banyak terjadi pada level partisipasi kegiatan, dan belum sepenuhnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan secara struktural. Selain itu, ditemukan pula bahwa sebagian masyarakat mengenal program-program yang dijalankan pemerintah, seperti kegiatan PKK atau pelatihan keterampilan, tetapi tidak menyadari bahwa program tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari strategi PUG itu sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program masih lebih banyak terlihat pada aspek implementasi kegiatan dibandingkan pada peningkatan kesadaran kritis masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan gender sebagai landasan dari program-program tersebut.

Sosialisasi Kesetaraan Gender

Sosialisasi menjadi aspek yang sangat penting mengingat karakteristik wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terdiri atas pulau-pulau berpenghuni yang tersebar dan dipisahkan oleh wilayah perairan, sehingga penyebaran informasi pembangunan membutuhkan strategi komunikasi yang lebih intensif dibandingkan wilayah daratan. Kepala Seksi Sudin PPAPP menjelaskan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis terkait PUG dilakukan secara terus-menerus, baik kepada UKPD maupun masyarakat, mengingat seringnya terjadi pergantian personel sehingga pemahaman mengenai PUG perlu terus diperbarui. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memandang penguatan pemahaman gender sebagai proses yang harus dibangun secara berkelanjutan, bukan melalui kegiatan yang bersifat satu kali.

Pada tingkat masyarakat, penyebaran informasi mengenai program pembangunan maupun isu kesetaraan gender dilakukan melalui kombinasi komunikasi langsung dan komunikasi digital. Keterangan masyarakat Kepulauan Seribu Utara menunjukkan bahwa informasi paling sering diperoleh dari rapat warga yang diadakan oleh RT atau RW, serta melalui grup percakapan WhatsApp lingkungan, dan apabila terdapat program baru biasanya disertai sosialisasi langsung dari pihak kelurahan atau kecamatan. Pemanfaatan grup WhatsApp menunjukkan adanya adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi komunikasi, sementara rapat warga tetap dipertahankan karena dipandang lebih efektif dalam membangun komunikasi dua arah dibandingkan media digital semata.

Meskipun demikian, beberapa kendala turut memengaruhi efektivitas sosialisasi di lapangan. Keterangan dari tokoh laki-laki di Kelurahan Pulau Kelapa menunjukkan bahwa sebagian warga tidak selalu memperoleh informasi karena sedang bekerja atau tidak aktif mengikuti kegiatan masyarakat, dengan keterbatasan waktu sebagai hambatan yang paling sering dihadapi mengingat banyak masyarakat yang bekerja pada sektor perikanan, pariwisata, dan aktivitas ekonomi lain yang menyita waktu. Kondisi geografis kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau juga menjadi tantangan tersendiri karena tidak seluruh masyarakat dapat dijangkau secara bersamaan dalam satu kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, sosialisasi memang berhasil meningkatkan penyebaran informasi mengenai program pemerintah, tetapi belum sepenuhnya berhasil mengubah konstruksi sosial yang telah lama berkembang mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan, sehingga tantangan utama sosialisasi PUG ke depan bukan hanya terletak pada penyampaian informasi, melainkan pada proses perubahan nilai dan budaya masyarakat yang memerlukan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender

Selain menganalisis strategi pemerintah daerah, penelitian ini juga mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap terwujudnya PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam pembangunan karena keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana program, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus subjek pembangunan itu sendiri. Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dianalisis menggunakan teori Ladder of Citizen Participation yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), dengan memfokuskan analisis pada tiga tingkatan yang paling relevan dengan kondisi lapangan, yaitu *informing*, *consultation*, dan *placation*, yang ketiganya tergolong dalam kategori *degree of tokenism* pada tangga partisipasi tersebut.

Informing

Tingkat *informing* merupakan tahap awal partisipasi, di mana pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program, kebijakan, maupun kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan informasi mengenai pembangunan dan PUG melalui berbagai saluran, antara lain rapat RT dan RW, forum kelurahan, Musrenbang, kegiatan PKK dan Dasawisma, organisasi perempuan lainnya, serta grup WhatsApp warga. Keterangan dari pihak Kelurahan Pulau Tidung menjelaskan bahwa setiap ada kegiatan pembangunan atau program pemerintah, informasi disampaikan melalui RT, RW, grup WhatsApp warga, dan forum-forum masyarakat, dengan kerja sama bersama PKK dan Dasawisma untuk kegiatan yang berkaitan dengan perempuan, sehingga seluruh unsur masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, diundang dan memiliki kesempatan yang sama untuk mengetahui program pemerintah.

Penyampaian informasi melalui berbagai jalur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan satu saluran komunikasi, melainkan memanfaatkan jaringan sosial yang telah berkembang di masyarakat. Namun, jika dicermati lebih jauh, proses ini masih lebih berorientasi pada penyebaran informasi (*information delivery*) dibandingkan memastikan informasi tersebut benar-benar dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Keterangan dari tokoh masyarakat menunjukkan bahwa meskipun rapat dan sosialisasi sering dilakukan dan masyarakat juga sering diundang untuk hadir, masih banyak warga yang belum memahami konsep gender secara utuh, dengan sebagian masih beranggapan bahwa gender adalah urusan perempuan semata, padahal konsep gender sejatinya menekankan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama memiliki hak dan peran dalam pembangunan.

Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tersampainya informasi dan terbangunnya pemahaman masyarakat terhadap substansi informasi tersebut. Dari sisi pemerintah, indikator keberhasilan *informing* dipandang telah tercapai karena informasi telah disebarluaskan

secara terbuka melalui berbagai forum dan media komunikasi yang tersedia, termasuk pelibatan organisasi perempuan untuk memperluas jangkauan informasi. Namun dari sisi masyarakat, persoalan utama bukan lagi pada ketersediaan informasi, melainkan pada efektivitas penyampaian informasi tersebut dalam membentuk pemahaman yang utuh mengenai PUG. Hal ini sejalan dengan pandangan Arnstein (1969) bahwa proses *informing*, meskipun penting sebagai langkah awal partisipasi, belum dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang bermakna apabila masyarakat tidak memperoleh kesempatan untuk memberikan umpan balik atau mempengaruhi keputusan berdasarkan informasi yang diterima.

Consultation

Tingkat consultation memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kebutuhan, kritik, maupun aspirasi kepada pemerintah melalui mekanisme komunikasi dua arah. Pemerintah daerah secara rutin membuka ruang konsultasi melalui forum Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten. Keterangan dari pihak Kelurahan Pulau Tidung menunjukkan bahwa dalam forum Musrenbang seluruh unsur masyarakat diundang, termasuk RT, RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), PKK, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, forum anak, dan kelompok nelayan, yang seluruhnya diberi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan yang dianggap penting bagi lingkungan mereka. Disampaikan pula bahwa di Pulau Tidung terdapat cukup banyak ketua RT perempuan yang aktif menyampaikan usulan masyarakat, sehingga perempuan turut memiliki kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dalam forum pembangunan.

Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam forum konsultasi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengakomodasi keberagaman kepentingan masyarakat, termasuk kelompok perempuan, sehingga proses pembangunan tidak sepenuhnya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Akan tetapi, hasil wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan adanya pandangan yang berbeda mengenai efektivitas forum konsultasi tersebut. Disampaikan bahwa meskipun rapat atau Musrenbang memang sering dilaksanakan dan masyarakat sering diminta menyampaikan usulan, pada kenyataannya banyak usulan yang tidak dijalankan, dan kadang yang dibangun justru bukan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga usulan yang telah dibahas dari tingkat bawah sering kali hilang atau tidak menjadi prioritas ketika diteruskan ke tingkat kecamatan atau kabupaten. Akibatnya, sebagian warga menjadi kurang bersemangat untuk mengikuti rapat karena merasa usulannya tidak ditindaklanjuti secara nyata.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat empat persoalan utama yang teridentifikasi dalam pelaksanaan consultation di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pertama, terdapat kesenjangan antara aspirasi yang disampaikan masyarakat dan program pembangunan yang akhirnya direalisasikan, karena banyak usulan yang tidak menjadi prioritas ketika memasuki proses perencanaan pada tingkat yang lebih tinggi. Kedua, belum terdapat mekanisme umpan balik (feedback) yang jelas kepada masyarakat mengenai alasan diterima atau ditolaknya suatu usulan, sehingga masyarakat sering tidak mengetahui nasib usulan yang telah mereka sampaikan. Ketiga, muncul kecenderungan menurunnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam forum pembangunan karena merasa usulan yang disampaikan tidak memberikan dampak nyata. Keempat, kondisi geografis Kepulauan Seribu yang terdiri dari beberapa pulau turut menjadi tantangan dalam menjaring aspirasi masyarakat secara merata, karena masyarakat yang aktif mengikuti kegiatan pemerintahan cenderung lebih mudah menyampaikan aspirasi dibandingkan masyarakat yang kurang terlibat dalam kegiatan sosial. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik consultation sebagaimana dijelaskan oleh Arnstein (1969), yakni masyarakat telah memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan, tetapi belum memiliki posisi yang cukup kuat untuk menentukan hasil akhir dari proses pembangunan.

Placation

Tingkat placation merupakan bentuk partisipasi pada level tokenisme yang lebih tinggi, di mana masyarakat tidak hanya diberi informasi dan ruang konsultasi, tetapi juga dilibatkan dalam proses pembangunan, misalnya melalui keterwakilan dalam forum atau kepanitiaan, meskipun kekuasaan utama dalam menentukan keputusan tetap berada pada pemerintah. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah berupaya menerapkan prinsip ini melalui Musrenbang, rapat lingkungan, kegiatan PKK dan Dasawisma, pelatihan UMKM, kelompok usaha perempuan, serta berbagai program pemberdayaan lainnya. Keterangan dari pihak Kelurahan Pulau Kelapa menjelaskan bahwa perempuan sebenarnya sudah diberikan kesempatan untuk hadir dalam rapat pembangunan maupun Musrenbang, tetapi dalam praktiknya laki-laki masih lebih aktif menyampaikan pendapat, sehingga kehadiran perempuan terkadang masih sebatas memenuhi keterwakilan dan belum sepenuhnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan pembangunan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang menganggap laki-laki lebih cocok berada pada posisi pengambil keputusan dibandingkan perempuan.

Pandangan yang relatif serupa juga disampaikan oleh masyarakat Kepulauan Seribu Utara, yang menjelaskan bahwa perempuan memang hadir dalam berbagai rapat atau kegiatan pembangunan, tetapi pihak yang paling sering berbicara dan memberikan pendapat biasanya tetap laki-laki, sementara perempuan lebih banyak mendengarkan atau mengikuti hasil keputusan yang telah disepakati. Disampaikan pula bahwa meskipun pelatihan usaha dan kegiatan UMKM cukup membantu perempuan secara ekonomi, untuk urusan pembangunan lingkungan atau pengambilan keputusan, posisi tersebut masih cenderung didominasi oleh laki-laki. Pola ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam forum pembangunan belum secara otomatis menghasilkan kekuatan untuk memengaruhi kebijakan, dan kehadiran mereka masih lebih banyak dipahami sebagai pemenuhan unsur representasi dibandingkan sebagai upaya memperkuat posisi tawar perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Sejumlah faktor turut mempengaruhi rendahnya pengaruh perempuan pada tingkat placation ini. Faktor budaya yang masih kuat menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih layak menjadi pemimpin atau pengambil keputusan menjadi salah satu penghambat utama, di samping faktor beban ganda yang masih dialami perempuan, di mana selain terlibat dalam kegiatan masyarakat, perempuan juga memikul tanggung jawab domestik dalam rumah tangga sehingga kesempatan mereka untuk aktif dalam forum pembangunan menjadi lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Kondisi demografis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dengan jumlah penduduk perempuan yang hampir seimbang dengan penduduk laki-laki, semakin menegaskan bahwa perempuan merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam pembangunan daerah, sehingga pelibatan perempuan idealnya tidak hanya dimaknai sebagai bentuk representasi simbolik, melainkan sebagai upaya substantif untuk memastikan kebutuhan perempuan benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pembangunan. Kondisi tersebut menegaskan karakteristik placation sebagaimana dijelaskan oleh Arnstein (1969), yaitu masyarakat, khususnya perempuan, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan sebagian usulannya dipertimbangkan, namun kewenangan utama dalam menentukan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan adanya dua pola yang saling berkaitan. Pada aspek strategi pemerintah daerah, dimensi kelembagaan, program, dan sosialisasi telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mewujudkan PUG, ditandai dengan terbentuknya regulasi dan struktur kelembagaan formal, beragam program pemberdayaan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta sosialisasi yang dilakukan melalui kombinasi saluran komunikasi konvensional dan digital. Namun, dimensi pelibatan dan kapasitas belum berjalan secara optimal karena keterlibatan masyarakat masih terkonsentrasi pada kelompok yang telah terorganisir, sementara kapasitas pemahaman gender antara aparatur dan masyarakat masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Pada aspek partisipasi masyarakat, ketiga indikator *informing*, *consultation*, dan *placation* secara konsisten menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi masih berada pada kategori tokenism menurut tangga partisipasi Arnstein (1969), yaitu masyarakat,

khususnya perempuan, telah diberikan ruang untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam forum pembangunan, tetapi belum memiliki kekuasaan yang memadai untuk menentukan hasil akhir dari keputusan pembangunan. Dengan demikian, tantangan utama PUG di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ke depan bukan lagi terletak pada ketersediaan ruang partisipasi, melainkan pada bagaimana mentransformasikan partisipasi yang bersifat simbolik tersebut menjadi partisipasi substantif yang benar-benar memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam dimensi kelembagaan, program, dan sosialisasi telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender, ditandai dengan terbentuknya Pokja PUG, pelaksanaan berbagai program pemberdayaan perempuan, serta sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai saluran komunikasi. Namun, pada dimensi pelibatan dan kapasitas, implementasi PUG belum berjalan optimal karena keterlibatan masyarakat masih terbatas pada penyampaian aspirasi dan belum memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan akhir, serta kapasitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat, dalam memahami dan mengintegrasikan perspektif gender masih belum merata. Pada aspek partisipasi masyarakat, masyarakat Kepulauan Seribu telah memperoleh informasi (*informing*) mengenai program dan kegiatan PUG serta diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui berbagai forum partisipatif (*consultation*). Akan tetapi, partisipasi yang terjadi masih berada pada tingkat *placation*, yaitu masyarakat telah diberikan ruang untuk terlibat dalam proses pembangunan, namun pengaruhnya terhadap keputusan akhir masih terbatas karena kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada pemerintah, tidak seluruh usulan masyarakat dapat diakomodasi sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran, serta belum terdapat mekanisme yang menjamin bahwa usulan kelompok perempuan akan ditindaklanjuti secara langsung.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Suku Dinas PPAPP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan secara berkala kepada aparatur dan masyarakat mengenai konsep dan analisis gender, mendorong keterlibatan masyarakat tidak hanya pada tahap penyampaian aspirasi tetapi juga pada tahap pembahasan, pemantauan, dan evaluasi program, membangun mekanisme umpan balik yang transparan atas usulan masyarakat, memperkuat pengelolaan data terpilah gender, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan organisasi masyarakat agar pelaksanaan PUG dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Gender Indonesia. Jakarta: BPS.
- Caroline O. N. Moser. (1993). Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. London: Routledge.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Jakarta: KPPPA.
- Mansour Fakih. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan Implementasi Pengarusutamaan Gender di DKI Jakarta. Jakarta: Pemprov DKI Jakarta.
- Putri, N. L., Yudha, T., & Rizki, M. F. (2025). Pengarusutamaan Gender dalam Pemerintah Daerah: Studi Naratif tentang Aktor Wanita dalam Partisipasi Wawasan Kebangsaan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Sherry R. Arnstein. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35(4), 216–224.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. Informasi bibliografi konsisten dengan edisi Alfabeta 2018.